

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2013-2016**ANALYSIS OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE OF SANGIHE ISLANDS DISTRICT NORTH SULAWESI PROVINCE 2013-2016**

Oleh :

**Diah Argariny Patempo¹
Victorya N. Untu²**^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail :

¹diahpatempo@gmail.com²victorianeiseyuntu@yahoo.com

Abstrak: Analisis kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan suatu daerah. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan suatu daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan serta dilaksanakan. Analisis kinerja keuangan dapat dilakukan dengan berbagai rasio diantaranya, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode analisis rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio efektivitas dapat dikategorikan tidak efektif, rasio efisiensi tergolong tidak efisien, rasio keserasian menunjukkan lebih banyaknya realisasi belanja operasi daripada belanja modal, hal ini kurang begitu baik. Rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang positif tiap tahunnya, dan rasio kemandirian tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk instruktif yang menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci : kinerja keuangan pemerintah daerah, rasio keuangan

Abstract: Analysis of local government performance can be seen from the financial performance of a region. One way to analyze the financial performance of a region is to conduct a financial ratio analysis of the Regional Expenditure Budget (APBD) that has been established and implemented. Financial performance analysis can be done with various ratios including, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Harmony Ratio, Growth Ratio and Independence Ratio. The purpose of this study was to determine the Financial Performance of the Sangihe Islands Regency Government. The type of research used is quantitative descriptive research using the ratio analysis method. The results showed that, the effectiveness ratio can be categorized as ineffective, the efficiency ratio is classified as inefficient, the harmony ratio shows more realization of operating expenditure than capital expenditure, this is not so good. The growth ratio shows positive growth each year, and the independence ratio is still very low and the relationship pattern is instructive which shows that the role of the central government is more dominant than the independence of the regional government. It is expected that the Sangihe Islands Regency Government can further increase Regional Original Revenue.

Keywords: Local Government Financial Performance, Financial Ratio

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini berada pada masa transisi dari era persaingan global menuju ke era persaingan informasi. Salah satu tolak ukur dari keberhasilan suatu negara ialah bagaimana menciptakan tata kelola yang baik dalam lingkungan pemerintahannya. Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola daerah sendiri menjadi tantangan yang harus diterima oleh pemerintah agar dapat membangun dan mengelola daerah masing-masing dengan baik. Pelimpahan wewenang pembangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan. Dengan adanya pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari perangkat daerah tersebut. Sehingga perlu dilakukan pengukuran kinerja terhadap pemerintah daerah tersebut.

Pada era globalisasi saat ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari system lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu system yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta biasa membudayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional.

Mardiasmo (2007:97) menyatakan Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu, (1) untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, (2) untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, dan (3) untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil merata, dan berkesinambungan. Apabila pemerintah mampu mengelola potensi daerah, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan secara optimal maka pemerintah daerah telah dianggap mampu untuk menjalankan kewajibannya. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari keberhasilan pengelolaan potensi-potensi tersebut dan juga ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih kecil dan lebih besarnya Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam periode waktu tertentu. Analisis kinerja keuangan APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah, harus diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sangihe dilihat dari :

1. Rasio Efektivitas
2. Rasio Efisiensi
3. Rasio Keserasian
4. Rasio Pertumbuhan
5. Rasio Kemandirian

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Kinerja Keuangan

Menurut Halim (2013:24), analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam APBD adalah analisis rasio keuangan.

Indikator Pengukuran Kinerja

Menurut Wibowo (2008:229), pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat 7 indikator kinerja, yaitu tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, motif, peluang.

Rasio Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010:143), Rasio Efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.

Rasio Efisiensi

Menurut Halim (2007:234), Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin membaik.

Rasio Keresasian

Menurut Halim (2007:236), Rasio Keresasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio Pertumbuhan

Menurut Mahmudi, (2010:138), Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.

Rasio Kemandirian

Menurut Halim (2007:241), Rasio Kemandirian menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumberdaya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman

Penelitian Terdahulu

Mokodompit, Pangemanan dan Elim (2014) dengan judul penelitiannya Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kota Kotamobagu, penelitian dilakukan di kantor walikota dan data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hasil penelitian menunjukkan, rasio derajat desentralisasi kinerja keuangannya, masih kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi, begitu juga dengan rasio kemandiriannya masih sangat rendah.

Rahmayati (2016) dengan penelitiannya Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-201. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio DCSR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah.

Pauwah, Saerang dan Mandey (2014) dengan judul penelitiannya Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada PEMDA Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

kondisi kinerja keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, untuk tahun anggaran 2008 sampai tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja keuangan Kabupaten Sula berdasarkan rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktifitas, rasio pengelolaan belanja, rasio pertumbuhan, berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah terhadap pengelolaan APBD.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Sugiyono, 2014

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini diduga bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam empat tahun terakhir (2013-2016) dilihat dari rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian baik dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai tujuan penelitian.

Populasi, Besaran Sampel, dan Teknik Sampling

Definisi populasi menurut Sukmadinata (2013:250) merupakan kelompok besar dan wilayah yang menjadi lingkup penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Sampel adalah kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan dari populasi. Sampel yang diteliti yaitu Laporan Keuangan tahun 2013-2016. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *purposive sampling* yakni penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan merupakan data publikasi yang berupa laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Sangihe.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio keuangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013-2016. Di dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas Pendapatan, Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, namun komponen dalam Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan hanyalah Pendapatan Daerah. Untuk mengukur kinerja keuangan tersebut digunakan perhitungan rasio keuangan.

1. Rasio Efektifitas

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 1. Hasil Perhitungan menggunakan Rasio Efektivitas

Tahun Anggaran	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
2013	34.620.154.464,48	32.165.776.372,39	92,91%	Tidak Efektif
2014	51.534.286.490,00	52.202.324.139,98	101,29%	Efektif
2015	54.925.140.087,00	52.124.061.430,66	94,90%	Tidak Efektif
2016	57.605.027.866,00	55.158.721.066,84	95,75%	Tidak Efektif

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah), 2018

Berdasarkan perhitungan pada tabel 1 dapat diketahui bahwa Efektivitas PAD Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2013, 2015 dan 2016 tidak efektif karena nilai yang diperoleh masih di bawah 100% yaitu 92,91%, 94,90% dan 95,75%. Untuk tahun 2014 sudah efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih 100% yaitu 101,29%. Hal ini karena pada tahun 2014 Realisasi PAD lebih tinggi dibandingkan Anggaran PAD.

2. Rasio Efisiensi

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Hasil Perhitungan menggunakan Rasio Efisiensi

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD	Kriteria
2013	598.076.222.875,00	618.793.331.352,39	96,65%	Efisien
2014	724.955.782.221,00	727.721.101.106,28	99,62%	Efisien
2015	778.891.830.478,00	792.661.932.540,66	98,26%	Efisien
2016	943.721.535.358,00	927.190.925.295,84	101,78%	Tidak Efisien

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah), 2018

Berdasarkan perhitungan pada tabel 2, Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2013, 2014 dan 2015 tergolong Efisien Karena interval Efisiensinya di bawah 100%. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja. Tahun 2016 tergolong tidak efisien karena di atas 100%. Hal ini diakibatkan karena total belanja melebihi total pendapatan daerah.

3. Rasio Keserasian

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Hasil Perhitungan menggunakan Rasio Keserasian (Belanja Operasi)

Tahun Anggaran	Total Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2013	598.076.222.875	494.385.392.317	82,66%
2014	724.955.782.221	575.662.265.766	79,40%
2015	778.891.830.478	568.994.023.052	73,05%
2016	943.721.535.358	754.143.197.661	79,91%

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah), 2018

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3, diketahui bahwa Rasio Keserasian Belanja Operasi Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe dimulai pada tahun 2013 dimana rasionya sebesar 82,66 menurun pada tahun 2014 menjadi 79,40 kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2015 yaitu 73,05% lalu pada tahun 2016 meningkat menjadi 79,91%.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Hasil Perhitungan menggunakan Rasio Keserasian (Belanja Modal)

Tahun Anggaran	Total Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2013	598.076.222.875	103.534.535.558	17,31%
2014	724.955.782.221	148.439.826.619	20,47%
2015	778.891.830.478	143.194.722.402	18,38%
2016	943.721.535.358	187.541.072.907	19,87%

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah), 2018

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4 bahwa Rasio Keserasian Belanja Modal pada tahun 2013 sebesar 17,31% mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 20,47%. Namun pada tahun 2015 kembali menurun menjadi 18,38 kemudian di tahun berikutnya 2016 mengalami peningkatan sebesar 19,87%. Dari analisis Rasio Keserasian, secara jelas terlihat bahwa sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal sehingga rasio belanja modal relatif lebih kecil.

4. Rasio Pertumbuhan

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Tabel 5. Hasil Perhitungan menggunakan Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan tahun n (Rp) (1)	Realisasi Pendapatan tahun n-1 (Rp) (2)	Pertumbuhan (1-2)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%) (1-2:2)
2013	618.793.331.352,39	532.876.695.669,17	85.916.635.683,22	16,12%
2014	727.721.101.106,28	618.793.331.352,39	108.927.769.753,89	17,60%
2015	792.661.932.540,66	727.721.101.106,28	64.940.831.434,38	8,92%
2016	927.190.925.295,84	792.661.932.540,66	134.528.992.755,18	16,97%

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah), 2018

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan tingkat pertumbuhan pendapatan paling tinggi tahun 2014 yaitu 17,60%, dan pertumbuhan pendapatan paling rendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 8,92%. Terjadi penurunan yang sangat tajam pada tahun 2015.

Tabel 6. Hasil Perhitungan menggunakan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Tahun Anggaran	Realisasi PAD tahun n (Rp) (1)	Realisasi PAD tahun n-1 (Rp) (2)	Pertumbuhan (Rp) (1-2)	Rasio Pertumbuhan PAD (%) (1-2:2)
2013	32.165.776.372,39	27.988.410.577,75	4.177.365.794,64	14,92%
2014	52.202.324.139,28	32.165.776.372,39	20.036.547.766,89	62,29%
2015	52.124.061.430,66	52.202.324.139,28	78.262.708,62	1,49%
2016	55.158.721.066,84	52.124.061.430,66	3.034.659.636,18	5,84%

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah), 2018.

Berdasarkan tabel 6, tingkat pertumbuhan PAD paling tinggi terjadi pada 2014 yaitu 62,29% dan tingkat pertumbuhan PAD paling rendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 1,49%.

Tabel 7. Hasil Perhitungan menggunakan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Modal tahun n (Rp) (1)	Realisasi Belanja Modal tahun n-1 (Rp) (2)	Pertumbuhan (1-2)	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal (%) (1-2:2)
2013	103.534.535.558	74.120.037.245	29.414.498.313	39,68%
2014	148.439.826.619	103.534.535.558	44.905.291.061	43,37%
2015	143.194.722.402	148.439.826.619	5.245.104.217	3,53%
2016	187.541.072.907	143.194.722.402	44.346.350.505	30,96%

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah), 2018

Tabel 7 menunjukkan pertumbuhan belanja modal tahun 2013 yaitu 39,68% kemudian paling tinggi terjadi tahun 2014 yaitu 43,37%. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan yaitu 3,53% kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 30,96%.

Tabel 8. Hasil Perhitungan menggunakan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi

Tahun Anggaran	Realisasi BO tahun n (Rp) (1)	Realisasi BO tahun n-1 (Rp) (2)	Pertumbuhan (1-2)	Rasio Pertumbuhan BO (%) (1-2:2)
2013	494.385.392.317	374.754.293.160	119.631.099.157	31,92%
2014	575.662.265.766	494.385.392.317	81.276.873.449	16,43%
2015	568.994.023.052	575.662.265.776	6.668.242.724	11,5%
2016	754.143.197.661	568.994.023.052	185.149.174.609	32,53%

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah), 2018.

Pada tabel 8 dapat dilihat Rasio Belanja Operasi tahun 2013 adalah yang paling tinggi yaitu 31,92% sedangkan Rasio Belanja Operasi yang paling rendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 11,5%.

5. Rasio Kemandirian

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Tabel 9. Hasil Perhitungan menggunakan Rasio Kemandirian

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2013	32.165.776.372,39	586.627.554.980,00	5,48%	Instruktif
2014	52.202.324.139,28	671.902.776.967,00	7,76%	Instruktif
2015	52.124.061.430,66	733.415.876.110,00	7,10%	Instruktif
2016	55.158.721.066,84	870.532.204.229,00	6,33%	Instruktif

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe (diolah), 2018

Berdasarkan hasil perhitungan pada table 4.9 diatas kemampuan keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

Pembahasan

Rasio Efektivitas

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa anggaran PAD Kabupaten Kepulauan Sangihe selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PAD dianggarkan sebesar Rp 34.620.154.464,48 atau 92,91% dari total anggaran pendapatan. Pada tahun 2014 anggaran PAD dinaikan menjadi Rp 51.534.286.490,00 atau 101,29% dari total anggaran pendapatan. Tahun 2015 anggaran PAD dinaikkan menjadi 54.925.140.087,00 atau 94,90% dari total anggaran. Kemudian tahun 2016 anggaran PAD naik menjadi 57.605.027.866,00 atau 95,75% dari total anggaran. Rasio Efektivitas dari tahun 2013, 2015 dan 2016 termasuk kategori tidak efektif, kecuali tahun 2014 termasuk kategori efektif. Berdasarkan hasil olah data tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki kinerja yang belum efektif karena rata-rata efektivitasnya dibawah 100% yaitu 96,21%.

Rasio Efisiensi

Diketahui realisasi belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 rata-rata mengalami kenaikan kecuali tahun 2016. Pada tahun 2013 belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp 598.076.222.875,00, naik menjadi Rp 724.955.782.221,00 pada tahun 2014. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 778.891.830.478,00. Dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 943.721.535.358,00. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dari tahun 2013-2015 menunjukkan terjadi perubahan yang berfluktuasi dan termasuk dalam kategori efisien. Sedangkan tahun 2016 terjadi penurunan sehingga masuk dalam kategori tidak efisien. Rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah 99,08. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih tergolong kurang efisien karena rata-rata rasionya dibawah 100%.

Rasio KecerAsian

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa realisasi total belanja Kabupaten Kepulauan Sangihe dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp 598.076.222.875, naik menjadi Rp 724.955.782.221 pada tahun 2014. Tahun 2015 meningkat menjadi Rp 778.891.830.478, kemudian naik menjadi Rp 943.721.535.358.

Total Realisasi Belanja Operasi daerah yang terdiri atas: Belanja Pegawai, belanja barang, belanja bunga. Belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bantuan keuangan dan belanja bantuan keuangan kepada vertikal dalam negeri selalu terjadi peningkatan dan penurunan. Tahun 2013 sebesar Rp 494.385.392.317, tahun 2014 sebesar Rp 575.662.265.766, tahun 2015 sebesar Rp 568.994.023.052 dan tahun 2016 sebesar Rp 754.143.197.661. Sedangkan total Realisasi Belanja Modal yang terdiri atas: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi tahun 2015 sedangkan tahun-tahun lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dapat dilihat bahwa Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal masih belum stabil. Dimulai ada tahun 2013 Rasio Belanja Operasi sebesar 82,66%, kemudian menurun menjadi 79,40%. Tahun 2015 kembali menurun menjadi 73,05% dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 79,91%. Sedangkan Rasio Belanja Modal tahun 2013 sebesar 17,31%, meningkat menjadi 20,47% tahun 2014. Kembali menurun pada tahun 2015 sebesar 18,38% dan meningkat menjadi 19,87% tahun 2016.

Dengan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintah dan belum memperhatikan pembangunan daerah.

Rasio Kemandirian

Untuk Rasio Kemandirian menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Kepulauan Sangihe dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2013 PAD Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp 32.165.776.372,39. Mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar Rp 52.202.324.139,28. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar Rp 52.124.061.430,66 dan meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp 55.158.721.066,84. Berdasarkan perhitungan pada table diatas menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 sebesar Rp 586.627.554.980,00, kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi Rp 671.902.776.967,00. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 733.415.876.110,00 dan kembali naik menjadi Rp 870.532.204.229,00 pada tahun 2016.

Kemampuan keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Jadi dapat dikatakan bahwa Kemandirian Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan pendapatan daerah dan rasio pertumbuhan PAD dari tahun 2013-2016 menunjukan ada pertumbuhan yang berfluktuasi, dengan rata-rata rasio pertumbuhan 14,90% dan rata-rata rasio pertumbuhan PAD yaitu 21,13%. Realisasi Pendapatan tahun 2013 sebesar Rp 618.793.331.352,39, tahun 2014 meningkat menjadi Rp 727.721.101.106,28. Pada tahun 2015 sebesar Rp 792.661.932.540,66 dan kembali meningkat sebesar Rp 927.190.925.295,84 pada tahun 2016. Untuk Realisasi Pertumbuhan PAD tahun 2013 sebesar Rp 32.165.776.372,39, tahun 2014 sebesar Rp 52.202.324.139,28. Pada tahun 2015 realisasi pertumbuhan PAD sebesar Rp 52.124.061.430,66 dan meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp 55.158.721.066,84. Berdasarkan perhitungan rasio tersebut dapat terlihat bahwa terdapat pertumbuhan yang positif setiap tahunnya, ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Rasio pertumbuhan belanja modal dan rasio pertumbuhan belanja operasi dari tahun ke tahun terjadi peningkatan dan penurunan. Realisasi belanja modal tahun 2013 Rp 103.534.535.558, kemudian naik pada tahun 2014 menjadi Rp 148.439.826.619. Pada tahun 2015 terjadi penurunan sebesar Rp 143.194.722.402, kemudian kembali meningkat sebesar Rp 187.541.072.907 tahun 2016. Rata-rata rasio pertumbuhan belanja modal adalah 29,38%. Realisasi belanja operasi tahun 2013 sebesar Rp 494.385.392.317 meningkat menjadi Rp 575.662.265.766 pada tahun 2014. Kemudian tahun 2015 menurun sebesar Rp 568.994.023.052 dan kembali meningkat sebesar Rp 754.143.197.661. Rata-rata rasio pertumbuhan belanja operasi 23,09%. Berdasarkan hasil perhitungan pada diatas, tingkat pertumbuhan belanja didominasi oleh pertumbuhan belanja modal.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD menunjukan kriteria tidak efektif karena berdasarkan hasil olah data selama 4 tahun hanya tahun 2014 yang tergolong efektif.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 99,07% atau dapat dikatakan Efisien.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe jika dilihat dari Rasio Keserasian belum stabil dari tahun ke tahun. Pengeluaran belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Besarnya belanja operasi

berada pada kisaran 73,05%-82,66%, rata-rata sebesar 78,75%. Sedangkan belanja modal berada pada kisaran 17,31%-20,47%, rata-rata sebesar 19%.

4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif.
5. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe harus dapat meningkatkan dan memperbaiki kinerja keuangan dan mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Selain itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat dengan lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Sangihe juga sebaiknya memberikan porsi lebih banyak pada belanja modal.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah. Selain itu diharapkan penelitian selanjutnya bisa dilakukan di lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- _____. 2013. *Manajemen Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta. <https://peraturan.go.id/inpres/nomor-7-tahun-1999-11e44c>. Diakses tanggal 5 Juni 2018.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2007. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Mokodompit, P.S., Pangemanan, S.S., dan Elim .I. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*. Vol.2 No.2 ISSN 2303-1174 Hal. 1521-1527. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4914>. Diakses tanggal 15-Juni-2018.
- Pauwah, F., Saerang, I., dan Mandey, S. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada PEMDA Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. *Jurnal EMBA*. Vol.2 No.3 ISSN 2303-1174 September, Hal 001-012 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5064>. Diakses tanggal 15-Juni-2018.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang *Keuangan Daerah*. Jakarta. www.djpk.depkeu.go.id/...uu-no-17-tahun-2003-tentang-keuangan. Diakses tanggal 3 Juni 2018.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta. www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/32. Diakses tanggal 2 Juni 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta. <https://djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010pemerintahan/>. Diakses tanggal 5 Juni 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. <https://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/.../permendagri-no-13-tahun-2006>. Diakses tanggal 5 Juni 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. <https://www.scribd.com/.../PENJELASAN-Pp-No-58-Tahun-2005-Ttg-Keuangan-Daerah>. Diakses 5 Juni 2018.
- Rahmayati, A. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukaharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal EKA CIDA*. Vol. 1 No.1 ISSN: 2503-3565 e-ISSN: 2503-3689 Maret. Hal 40-54. <https://journal.amikomsolo.ac.id/index.php/ekacida/article/viewFile/9/12>. Diakses 17 Juni 2018.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sukmadinata, N.S. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan. PT. Remaja Rosdakarya*, Bandung.
- Wibowo. 2008. *Manajemen Kinerja*. Edisi Lima. Rajagrafindo Persada, Jakarta.